

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Humaniter, sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik, belum banyak dikenal oleh masyarakat umum. Tidak banyak yang mengira bahwa Hukum Humaniter merupakan nama baru dari Hukum Perang (*Law of War*). Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah seperangkat aturan yang berusaha untuk membatasi konsekuensi terhadap kemanusiaan dari konflik bersenjata. Terkadang sering juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*). Mochtar Kusumaatmadja memberikan pembagian terhadap hukum perang, yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Istilah *jus ad bellum* memiliki arti yaitu hukum tentang perang, yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata, sedangkan istilah *jus in bello* memiliki arti hukum yang berlaku dalam perang.¹ Hukum yang berlaku dalam perang masih dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu :

1. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) atau biasa disebut dengan *Hague Laws*

¹ Haryomataram, KGPH, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), halaman 6.

2. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut *Geneva Laws*²

Tujuan utama dari HHI adalah untuk membatasi sarana dan metode peperangan, apa yang dapat digunakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk memastikan perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Singkatnya, HHI terdiri dari aturan-aturan hukum internasional yang menetapkan standar minimum kemanusiaan yang harus dihormati dalam setiap situasi konflik bersenjata. HHI telah dirancang khusus untuk diterapkan dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, pihak yang berperang tidak dapat membenarkan apabila terjadinya suatu kegagalan terhadap penghormatan HHI dengan menggunakan hal-hal yang tidak dibenarkan dari konflik bersenjata. Pihak-pihak yang bertikai harus tetap mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka dalam segala keadaan. Hal ini juga berarti bahwa HHI sama mengikatnya terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, terlepas dari motivasi mereka atau sifat atau asal mula konflik.³

Tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap manusia sebagai korban dalam konflik bersenjata, HHI juga melindungi benda-benda sipil, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, benda cagar budaya, dan benda lainnya yang bukan bagian dari obyek militer. Secara umum, ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap benda-benda tersebut dapat ditemukan dalam

² *Ibid*, halaman 7.

³ N. Melzer and E. Kuster, *International Humanitarian Law. A comprehensive Introduction*, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2016, P. 360.

instrumen-instrumen Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap benda budaya juga diatur di dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata.

Konvensi Den Haag tahun 1954 ini bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional pertama yang fokus pada perlindungan benda budaya dalam situasi konflik bersenjata. Salah satu yang melatarbelakangi lahirnya konvensi ini yakni banyaknya situs bersejarah dan benda budaya yang hancur setelah Perang Dunia II.⁴ Konvensi tersebut terdiri dari Konvensi itu sendiri, dengan empat puluh artikel. Ada juga protokol tambahan untuk Pelaksanaan Konvensi yang ditambahkan ke Konvensi, yaitu Protokol Pertama 1954 (lima belas artikel) dan Protokol Kedua 1999 (empat puluh empat artikel).⁵

Dalam konflik bersenjata, benda cagar budaya (*Cultural Properties*) mendapat perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional karena perusakan atas benda budaya adalah sama halnya dengan perusakan atas warisan umat manusia. Perlu diketahui bahwa benda budaya bukan hanya penggambaran dari suatu peradaban tertentu, akan tetapi secara bersamaan membentuk suatu peradaban dunia. Dengan demikian adanya “*missing link*” dalam peradaban bangsa tertentu akan berpengaruh terhadap kesinambungan peradaban umat manusia secara keseluruhan. Benda-benda yang dilindungi sebagai benda budaya berdasarkan pengertian Pasal 1 Konvensi Den Haag

⁴ Adam Roberts and Richard Guelff, *Documents on the Laws of War* 3rd ed., (Oxford : Oxford University Press, 2000), P. 371

⁵ Solis, Gary D, *The Law of Armed Conflict* 2nd ed., (New York : Cambridge University Press, 2016), P.559

1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Konflik Bersenjata, adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak yang sangat penting bagi warisan budaya semua orang, seperti monumen arsitektur atau sejarah, situs arkeologi, karya seni, buku atau bangunan apa pun yang tujuan utamanya dan efektif adalah mengandung kekayaan budaya. Dalam upaya melindungi dan melestarikan benda budaya, selain membuat pengaturan perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata, bentuk usaha lainnya adalah dengan diadakannya program Warisan Dunia Internasional oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (“UNESCO”), yang merupakan organisasi pendidikan dan kebudayaan internasional.



Program Warisan Dunia Internasional bertujuan untuk mengkatalog, menamakan, dan melestarikan tempat-tempat yang sangat penting untuk dijadikan Situs Warisan Dunia UNESCO. Tempat-tempat yang didaftarkan dapat memperoleh dana dari UNESCO di bawah syarat-syarat tertentu. Situs Warisan Dunia UNESCO adalah sebuah tempat khusus (misalnya, Taman Nasional, Bangunan dan Kompleks) yang telah dinominasikan untuk program Warisan Dunia internasional yang dikelola *UNESCO World Heritage Committee*, terdiri dari 21 kelompok yang dipilih oleh Majelis Umum dalam kontrak 4 tahun. Sebuah Situs Warisan Dunia adalah suatu tempat Budaya dan Alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.⁶

⁶ Sophia Labadi, *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value Based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), Halaman 45

Dari banyaknya situs-situs yang ditunjuk oleh UNESCO, Kota Timbuktu adalah salah satu dari situs Warisan Dunia yang ditambahkan kedalam daftar Warisan Dunia pada tahun 1998.

Tabel 1.1 Peninggalan bersejarah di Kota Timbuktu

Nama Peninggalan	Keterangan	Gambar
<i>Sidi Yahya Mosque</i>	Sidi Yahya adalah masjid dan madrasah Timbuktu di Mali yang selesai dibangun pada 1440. Sidi Yahya bersama dengan Djinguereber dan Sankore menyusun "Universitas" Timbuktu.	
<i>The door of Sidi Yahya Mosque</i>	Pintu masjid yang dihiasi perhiasan logam yang luas dan fitur Tuareg klasik.	
<i>Sankore Mosque</i>	Masjid Sankore adalah pusat pembelajaran tertua yang terletak di Timbuktu, Mali, Afrika Barat.	

<i>Djinguereber Mosque</i>	Masjid Djinguereber adalah sebuah Masjid indah dikota tua Timbuktu yang merupakan pusat pendidikan dan agama selama berabad-abad.	
<i>Tombs of 333 Sufi Saints</i>	Berjumlahkan 16 makam, merupakan harta dari tempat yang dikenal sebagai "kota 333 orang suci", beberapa berasal dari abad ke-13, diyakini oleh penduduk setempat untuk melindungi kota mereka dari bahaya.	

Sumber :UNESCO, Timbuktu, UNESCO World Heritage List, (<http://whc.unesco.org>, accessed on March 20, 2019)

Pada bulan Januari tahun 2012, konflik bersenjata telah terjadi di wilayah Mali dan menyebabkan berbagai kelompok bersenjata mengambil kendali atas bagian utara negara tersebut. Sekitar awal bulan April tahun 2012, setelah mundurnya angkatan bersenjata Mali, kelompok-kelompok Ansar Dine dan *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb* ("AQIM") mengambil alih kota Timbuktu. Kelompok-kelompok Ansar Dine dan Aqim telah menerapkan dekrit agama dan politik mereka di wilayah Timbuktu dan masyarakatnya sejak awal bulan April tahun 2012 hingga bulan Januari Tahun 2013. Mereka melakukannya melalui pemerintah daerah, yang

meliputi pengadilan Islam, pasukan polisi Islam, komisi media dan brigade moralitas yang disebut *Hesbah*.⁷

Serangan terhadap benda cagar budaya dilakukan sekitar tanggal 30 Juni 2012 dan 11 Juli 2012. Sepuluh situs paling penting dan terkenal di Timbuktu diserang dan dihancurkan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi dan individual-individual lainnya yang mengikuti rencana bersama (*common plan*) yang sama.

Perlindungan terhadap benda cagar budaya telah diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional maupun hukum domestik sedemikian rupa agar tetap terjaga eksistensinya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perang dalam masa konflik bersenjata. Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah kasus kejahatan perang yang terjadi di Timbuktu, Mali seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Kasus tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan negara Mali untuk mengadili, namun apabila pengadilan nasional negara Mali tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili maka Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, “ICC”) dapat menerapkan yurisdiksinya karena sifatnya yang komplementer. ICC bersifat komplementer memiliki arti bahwa sebagaimana telah ditekankan dalam Mukadimah Statuta Roma 1998, ICC hanya pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional, sehingga suatu kasus kejahatan paling serius yang menyangkut

⁷ Al Mahdi, Case Information Sheet, ICC-01/12-01/15, 20 Maret 2018 (<https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/Al-MahdiEng.pdf>, diakses 26 Februari 2019)

masyarakat internasional secara keseluruhan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi dapat diteruskan ke ICC. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Statuta Roma 1998 disebutkan bahwa :

A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.

Maskud dari pasal tersebut adalah apabila suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terlihat telah dilakukan maka kasus tersebut dapat diteruskan oleh suatu Negara Pihak Statuta kepada Penuntut Umum (*Prosecutor*) ICC.

Situasi yang terjadi di Mali secara prosedural tiba di Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 13 Juli 2012 melalui surat yang disampaikan oleh pemerintah Mali.⁸ Berdasarkan *Letter from The Minister of Justice Malick Coulibaly to Madam Prosecutor of The International Criminal Court, No. 0076/MJ-SG July 13, 2012* disebutkan : *“Investigate the situation in Mali since January 2012 [to present] with a view to determining whether one or more persons identified (by the investigation) should be charged and brought to justice where Mali’s courts are unable to prosecute or try those persons.”*⁹

Surat tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Nasional Mali tidak mampu

⁸ Al-Mahdi, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/12-01/15, 24 March 2016, para.3.

⁹ Daniel M. Cole, *From The Hague to Timbuktu : The Prosecutor V. Ahmad Al Faqi Al Mahdi; A Consequential Case of Firsts for Cultural Heritage and for The Internasional Criminal Court*, P. 414

(unable) untuk mengadili kasus tersebut sehingga Mahkamah Pidana Internasional dapat menerima kasus tersebut dan menerapkan yurisdiksinya.

Setelah melaksanakan pemeriksaan awal, Kantor Penuntut Umum (*The Office of the Prosecutor, "OTP"*) membuka investigasi pada tanggal 16 Januari 2013 kedalam dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah Mali sejak tahun 2012. Ahmad Al Faqi Al Mahdi didakwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3)(a), Pasal 25 ayat (3)(b), Pasal 25 ayat (3)(d) Statuta Roma 1998, bahwa ia bertanggung jawab secara individu atas Kejahatan Perang yang terjadi di Mali, yaitu penyerangan secara sengaja terhadap 9 makam besar bersejarah, dan pintu Masjid Sidi Yahia yang bersejarah, dimana 8 dari 9 makam tersebut dan bangunan masjid tersebut telah terdaftar sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi oleh UNESCO, sesuai dengan Pasal 8 (2) (e) (iv) Statuta Roma 1998.¹⁰

Pada tanggal 18 September 2015, ICC mengeluarkan surat perintah untuk penangkapan Ahmad Al Faqi Al Mahdi.¹¹ Ahmad Al Faqi Al Mahdi pada akhirnya diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional oleh otoritas Nigeria dan dipindahkan ke Pusat Penahanan Mahkamah Pidana Internasional di Belanda.

Di dalam tuntutananya, OTP mengajukan tuntutan bahwa Al Mahdi harus divonis antara sembilan sampai sebelas tahun penjara atas kejahatan perang yang telah diperbuatnya. Keputusan Hakim Mahkamah Pidana

¹⁰ Al-Mahdi, Pre- Trial Chamber VIII, Judgement and Sentence, ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, para.63-64.

¹¹ Al-Mahdi, Pre- Trial Chamber VIII, Judgement and Sentence, ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, para.4

Internasional dalam memutus sembilan tahun hukuman penjara adalah bentuk konkrit dari sebuah penegakan hukum humaniter internasional dalam rangka melindungi benda cagar budaya, terlepas situasi maupun alasan apapun dalam melakukan penyerangan terhadap benda-benda tersebut.

Hal-hal yang telah dibahas diatas adalah hal yang menarik untuk dipelajari secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana praktik dari penerapan hukum humaniter internasional serta praktik dalam mengadli pelanggaran-pelanggaran atas hukum humaniter dijalankan. Mempertimbangkan hal-hal diatas, maka dilakukan penelitian untuk disusun sebagai skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM KASUS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH AHMAD AL FAQI AL MAHDI DI TIMBUKTU MALI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang diteliti adalah :

1. Kejahatan apakah yang dilakukan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi sehingga diadili di Mahkamah Pidana Internasional?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Pidana Internasional memutus Ahmad Al Faqi Al Mahdi sebagai pelaku kejahatan perang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih lanjut mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi sehingga diadili di Mahkamah Pidana Internasional .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih lanjut mengenai hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Pidana Internasional dalam memutus Ahmad Al Faqi Al Mahdi sebagai pelaku kejahatan perang dan bersalah atas tindakannya yang dilakukan di Timbuktu, Mali.

D. Manfaat Penelitian

Hukum Humaniter Internasional mempunyai peranan yang penting dalam memberikan perlindungan bagi para pihak (subyek maupun obyek) yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, terkhusus terhadap eksistensi benda-benda bersejarah peninggalan budaya yang memiliki nilai penting bagi umat manusia. Pengetahuan dalam bidang hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata beserta bagaimana penegakan hukum atas pelanggarannya harus semakin ditingkatkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mendalami bidang hukum humaniter internasional yang berkaitan

dengan perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata beserta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atasnya. Selain itu, pembaca dapat senantiasa menambah pemahaman mengenai Hukum Humaniter Internasional terutama mengenai perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata melalui Konvensi Den Haag Tahun 1954 beserta 2 protokol tambahannya, Konvensi UNESCO Tahun 1972, Konvensi Jenewa 1949 beserta 2 protokol tambahannya, *Customary International Humanitarian Law* yang telah dikodifikasi beserta pemahaman mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui Statuta Roma 1998.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pustaka wawasan dan menambah referensi dibidang hukum internasional pada khususnya yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional terhadap perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata beserta bagaimana penegakan hukum atas pelanggarannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata beserta bagaimana penegakan hukum atas pelanggarannya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini berbentuk skripsi mengenai analisis regulasi dan analisis hasil putusan Mahkamah Pidana Internasional yang terbagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu dengan yang lainnya adapun gambaran mengenai sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan sebagai bahan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tinjauan umum perlindungan hukum humaniter internasional terhadap warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata dan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut yang terdiri dari konvensi-konvensi internasional, *Customary International Humanitarian Law* dan yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional, dan penjelasan atau *commentary* yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap aturan-aturan tersebut.

BAB III. Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis / peneliti menyajikan secara sederhana langkah langkah penelitian yang dilakukan. Dalam hal penelitian normatif, disajikan bahan- bahan hukum yang relevan, dengan analisis deduktif dan interpretatif.

Bab ini antara lain berisi Metode Pendekatan; Spesifikasi Penelitian; Metode Pengumpulan Data; Analisis Data.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab IV, berisi analisis dari konvensi-konvensi internasional, *Customary International Humanitarian Law* dan yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional, dan penjelasan atau *commentary* yang diberikan oleh para ahli hukum mengenai perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata sehingga dapat menjabarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi dan alasan mengapa pelanggaran tersebut diadili di Mahkamah Pidana Internasional dan analisis terhadap putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam memutus Ahmad Al Faqi Al Mahdi sebagai pelaku kejahatan perang atas tindakannya yang terjadi di Timbuktu, Mali .

BAB V. Penutup

Bab V berisi kristalisasi dari Bab-Bab sebelumnya yang merupakan kesimpulan dan saran.